

Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Taruna Bakti

Sururul Murtadlo

Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Khairiyah Cilegon
Jl. KH. Enggus Arja No.1 Citangkil
sururul.murtadlo@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk dapat menggali dan mengkaji informasi mengenai implementasi pendidikan multikultural dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang dilaksanakan sekolah SMA Taruna Bakti Bandung. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif, untuk mengungkapkan dan memahami kenyataan yang terjadi secara intensif di kehidupan sehari-hari yang berkenaan dengan fenomena di atas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi. Temuan penelitian ini adalah; 1) Penerapan dan proses berlangsungnya pembelajaran PKn berbasis multikultural terlaksana melalui langkah: memilih topik dan materi yang dapat diintegrasikan dengan muatan pendidikan multikultural dengan menggunakan metode pembelajaran bersama (Cooperative Learning), sumber belajar yaitu buku dan kontekstual, siswa memulai belajar dengan berdoa melalui 2 cara yakni ibadah pagi dan berdo'a menurut kepercayaan masing-masing. 2) Faktor pendukung dalam pembelajaran PKn berbasis multikultural adalah siswa yang berlatar belakang berbeda-beda, materi yang menekankan pada kerukunan, media berupa audio visual, sumber belajar berupa buku teks, film yang bernuansakan multikulturalisme, evaluasi pembelajaran yang menekankan pada aspek kerjasama dan perilaku siswa. 3) Kendala dalam penerapan pendidikan multikultural dalam pembelajaran PKn tidak terlihat signifikan akan tetapi perdebatan yang dilandasi oleh emosi sesaat dan faktor usia yang masih muda. 4) Upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi, guru berperan lebih banyak untuk mengatasi perdebatan dan permasalahan yang muncul dan pihak sekolah terus melakukan upaya pembinaan pembangunan karakter siswa yang saling menghormati dan sopan-santun kepada semua pihak.

Kata Kunci: Pendidikan Multikultural, Pendidikan Kewarganegaraan

Pendahuluan

Dengan adanya legalitas dalam penyelenggaraan pendidikan telah melahirkan setiap daerah untuk mendirikan sebuah lembaga penyelenggara pendidikan, karena dirasa sangat penting bagi masyarakat yang memungkinkan kemudahan bagi setiap individu untuk mendapatkan pendidikan. Setiap satuan sekolah dapat menerima siswa dari kalangan manapun, yang kemudian menjadikan sekolah memiliki keberagaman dari berbagai aspek. Keberagaman tersebut dapat dilihat dari perbedaan Suku, Agama, Ras, Adat dan Latar Belakang siswa.

Hal ini dapat kita pahami dikarenakan Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai negara kesatuan yang tentu kemajemukan akan ditemukan di masyarakatnya, kemajemukan tersebut dibingkai dalam suatu kesatuan yang utuh yang merupakan identitas dan entitas dari bangsa Indonesia. Dimana Indonesia mempunyai beragam suku, agama, ras, dan adat (budaya). Hal ini tercermin dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna kemajemukan dijadikan satu diatas perbedaan yang ada di Indonesia.

Seperti yang diungkapkan oleh Imam (2012: 1), bahwa: Indonesia merupakan negara yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang besar dan dengan budaya yang sangat beragam. Sekitar 200 juta penduduk yang tersebar kurang lebih dari 13.000 pulau. Wilayah Indonesia tersusun atas 33 propinsi, 440 kabupaten/kota, 5.263 kecamatan, serta 62.806 desa. Terdapat puluhan suku bangsa dengan adat istiadat yang berbeda, dan lebih dari 660 bahasa daerah yang digunakan oleh penduduk Indonesia. Sejumlah 293.419 satuan pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA) di Indonesia tersebar di berbagai wilayah, total 51,3 juta siswa dan 3,31 juta guru.

Siswa akan merasakan sebuah kebersamaan, rasa persaudaraan, keharmonisan di antara mereka ketika memahami makna keberagaman (multikultur) itu sendiri. Pemahaman multikultur tidak hanya sebuah konsep belaka, akan tetapi multikultur harus dilakukan dengan nyata yang diintegrasikan oleh pemerintah yang berwenang dalam sebuah wadah, salah satunya pada lembaga Pendidikan. Pendidikan merupakan cara yang tepat untuk bisa memberikan pemahaman dan pengimplementasian dari konsep negara multikulturalisme dengan pendidikan berbasis multikultur. Seperti yang diungkapkan oleh M. Ainul Yakin (Kusmarni, 2012: 4), bahwa: Pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara

menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada peserta didik, seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan dan umur agar proses belajar menjadi efektif dan mudah. Lebih lanjut Ainul mengungkapkan bahwa pendidikan multicultural juga untuk melatih dan membangun karakter siswa agar mampu bersikap demokratis, humanis dan pluralis dalam lingkungan mereka.

Lebih lanjut H.A.R. Tilaar (Mahfud. 2011: 221) mengatakan bahwa “pendidikan multikultural telah menjadi suatu tuntutan yang tidak dapat ditawar-tawar dalam membangun Indonesia Baru. Namun pendidikan berbasis multikultur ini memerlukan kajian yang mendalam mengenai konsep dan praksis pelaksanaanya”.

Masyarakat akan tercermin dari pendidikan, jika pendidikan itu baik akan menciptakan masyarakat yang baik (*good citizen*), akan tetapi jika pendidikan gagal maka akan menciptakan masyarakat yang gagal pula. Masyarakat yang gagal adalah masyarakat yang mengabaikan nilai-nilai luhur dan berlaku amoral. Dan masyarakat yang baik merupakan warisan berharga yang akan tetap menjaga negara Indonesia, dan memiliki kemauan untuk tetap bersatu diatas perbedaan bukan sebaliknya. Budimansyah dan Suryadi (2008:31)

mengemukakan, bahwa : Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Pendidikan kewarganegaraan yang berperan penting dalam pendidikan multikultural mempersiapkan peserta didik menjadi warga Negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara kesatuan republik Indonesia.

Dalam visi misi sekolah SMA Taruna Bakti mencerminkan sebagai lembaga yang mengedepankan toleransi atas perbedaan. Yakni menjadi lembaga pendidikan pembauran terkemuka yang mampu menumbuhkan siswa dan menghasilkan lulusan yang cerdas, disiplin, kreatif, berbudi pekerti luhur, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan kehidupan pada tataran nasional dan internasional. Serta menciptakan suasana dan lingkungan sekolah yang mampu menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghormati.

Pendidikan Multikultural

Multikulturalisme berasal dari kata multi yang berarti *banyak*, dan kultur yang berarti *budaya*, dan isme artinya *aliran* atau *paham*. Irwan (Mahfud, 2011: 90) mengemukakan bahwa Multikulturalisme sebagai sebuah paham yang menekankan pada kesetaraan dan kesetaraan budaya-budaya lokal tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya yang ada. Dengan kata lain, penekanan utama multikulturalisme adalah kesetaraan budaya.

Pendapat lain diungkapkan oleh Naim & Sauqi (2010: 126) yang berpendapat bahwa “Multikulturalisme merupakan sebuah paham atau situasi kondisi masyarakat yang tersusun dari banyak kebudayaan. Multikulturalisme sering merupakan perasaan nyaman yang dibentuk oleh pengetahuan”.

Istilah multikulturalisme ini juga sering dipahami sebagai *Plural society* yang diperkenalkan oleh JS Furnival. Menurut Furnival (Mahfud, 2011: 84) mengemukakan bahwa “masyarakat plural adalah masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih unsur-unsur atau tatanan-tatanan sosial yang hidup berdampingan, tetapi tidak bercampur dan menyatu dalam satu unit politik tunggal”.

Masyarakat multikultural merupakan komunitas atau kelompok-kelompok yang secara kultural, ekonomi dan politik terpisah-pisah serta memiliki struktur kelembagaan yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya, atau dengan kata lain merupakan suatu masyarakat di mana sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagiannya adalah sedemikian rupa sehingga para anggotanya kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan.

Dengan adanya pemahaman seperti itu, setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya. Keberagaman di Indonesia saat ini belum dipahami oleh segenap warga masyarakat sebagai suatu *given*, takdir Tuhan, dan bukan faktor bentukan manusia. Andersen dan Crusher (Mahfud, 2011: 175) mengemukakan bahwa pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan sebagai pengenalan dan pemahaman mengenai kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia ini. Pemikiran tersebut diungkapkan pula oleh Freire (Mahfud, 2011: 176) bahwa:

Pendidikan bukan merupakan “menara gading” yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya. Pendidikan, menurutnya harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan, bukan sebuah masyarakat yang hanya mengagungkan prestise sosial sebagai akibat kekayaan dan kemakmuran yang dialaminya.

Pendidikan berbasis multikultur merupakan sebuah perspektif yang mengakui realitas politik, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan yang kompleks dan beragam (*plural*) secara kultur. Sudah seharusnya pendidikan Indonesia memberikan pendidikan yang mengedepankan sikap demokratis.

Tujuan dan Fungsi Pendidikan Multikultural

Tujuan dari pendidikan multikultural adalah untuk membentuk “Manusia Budaya” dan menciptakan “Masyarakat Berbudaya”. Tujuan dan fungsi dari pendidikan multikultural merupakan amanat dari tujuan dan fungsi pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 yakni :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sedangkan Menurut Clive Black (Naim & Sauqi, 2010: 52-53) tujuan pendidikan multikultural adalah: a) *Teaching ethnic” student about their own ethnic culture, including perhaps, heritage language instruction; and b) Teaching all student about various tradisional cultures, at home and abroad. While such studies can be pursuit in a variety of ways, what is unsually missing is systematic treatment of fundamental issues of cultur and ethnicity; c) Promoting acceptance of ethnic diversity in society, d) Showing that people of differents religions, races, national background and so on are equal worth, d) Fostering full acceptance and equitable treatment of the etnic sub-cultures associated with different religions, race, national background, etc. in one’s own country and in other parts of the world; e) Helping student to works toward more adequate cultural form, for themselves and for society*

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pendidikan multicultural membentuk manuswia berkeadaban dan mengajarkan nilai-nilai luhur dan juga nasionalisme.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Pamela L. Tiedt dan Iris M. Tiedt (1990: 5) mengemukakan bahwa:

“As already state, the overall goal of multicultural education is world harmony, the understanding that will enable us to coexist in the world with diverse people. Without true understanding from all sides, we will inevitable have wars, more specifically, the primary aim of multicultural teaching is to develop awareness of all the people who make up the united state as human beings with smiliar need and aspirations”. Tujuan dari pendidikan multikultural adalah menciptakan dunia yang harmonis, pemahaman akan adanya masyarakat yang berbeda di dunia. Tanpa pemahaman yang betul dari segala sisi, kita akan tak terelakan dari peperangan, lebih lanjut, tujuan utama dari pengajaran multikultural yaitu untuk mengembangkan kesadaran kepada semua orang dalam kehidupan bersama dengan persamaan keinginan dan cita-cita.

Pendekatan pendidikan Multikulutral

Untuk dapat mengimplementasikan dan mengembangkan pendekatan dalam pembelajaran yang terintegrasi di semua disiplin ilmu terutama dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Jams Bank (Mahfud, 2011: 177) menjelaskan, bahwa pendidikan multikultural memiliki beberapa dimensi yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: 1) *Content Integration*, 2) Mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam mata pelajaran/disiplin ilmu.

3) *The Knowledge Construction Process.*, 4) Membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran (disiplin)., 5) *An Equity Paedagogy* Yaitu menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya (*culture*) ataupun sosial (*social*)., 6) *Prejudice Reduction* Mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pegajaran mereka. Kemudian melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, berinteraksi dengan seluruh staf dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik yang toleran dan inklusif.

Dalam pembelajaran di persekolahan guru mengambil peran penting dan dominan dalam pentransformasian pengetahuan, dimana setiap guru akan mempunyai gaya mereka tersendiri, namun gaya demokratis akan lebih menggunakan kelas menjadi

ruang demokrasi bagi siswa. Menurut Aly (Maulana, 2008) bahwa Melalui pendekatan demokratis ini, para guru dapat menggunakan beragam strategi pembelajaran, seperti dialog, simulasi, bermain peran, observasi, dan penanganan kasus.

Dengan strategi pembelajaran tersebut para siswa diharapkan memiliki wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang adanya keragaman dalam kehidupan sosial. Kemudian mereka akan memiliki pengalaman nyata untuk melibatkan diri dalam mempraktikkan nilai-nilai dari pendidikan multikultural dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku yang toleran, simpatik, dan empatik pun pada gilirannya akan tumbuh pada diri masing-masing siswa. Dengan demikian, proses pembelajaran yang difasilitasi guru tidak sekedar berorientasi pada ranah kognitif, melainkan pada ranah afektif dan psikomotorik sekaligus.

Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan (*civics education*) merupakan konsep yang pada awal mulanya digunakan oleh bangsa Yunani, yang dikenal dengan istilah *Civics*, yang berasal dari bahasa Latin yaitu *civicus* yang artinya penduduk dari sebuah kota. Wuryan, S. & Syaifullah (2009: 5) mengemukakan bahwa pelajaran *civics* mulai diperkenalkan pada tahun 1970 dalam rangka mengamerikakan bangsa Amerika (*nation building*), sebab bangsa Amerika terdiri dari bermacam-macam suku, bangsa ras, maupun etniknya. Usaha ini dikenal dengan “*Theory of Americanization*”.

Lebih lanjut Wuryan, S. & Syaifullah (2009: 5) mengemukakan bahwa:

Pada mulanya pelajaran *civics* ini hanya membahas “*government*” atau pemerintahan saja, namun sejalan dengan perkembangan masyarakat yang tidak puas dalam hal ini, muncul gerakan *community civic* pada tahun 1907 yang dipelopori oleh W.A. Dunn. Maksud dari gerakan tersebut adalah agar *civics* lebih fungsional dalam menghadapkan siswa pada lingkungan atau kehidupan sehari-hari dengan ruang lingkup lokal, nasional dan internasional.

Pengertian lain yang berbeda diungkapkan oleh Carter Van Good (Wuryan, S. & Syaifullah, 2009: 12) yakni *civics* adalah “*the element of political science of that branch of political science dealing with the rights and duties of citizens*”. Berdasarkan definisi tersebut *civics* merupakan bagian atau elemen dari ilmu politik atau cabang dari ilmu politik yang berisi tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban warganegara.

Dari pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa istilah *civics* merujuk pada sebuah konsep pembelajaran yang mengedapankan masalah pemerintahan dan pada awal mulanya pembelajaran *civics* di amerika bertujuan sebagai penanaman sikap nasionalisme bangsa Amerika yakni dengan mengamerikakan bangsa amerika (*nation building*). Dan juga sebuah pembelajaran mengenai hak dan kewajiban warga negara, namun istilah *civics* kemudian berganti dengan istilah *civics education*, seperti yang diungkapkan oleh Budimansyah & Suryadi (2008: 3) bahwa “masih pada tahun 1900-an, munculah istilah “*civics Education*” sebagai istilah baru, yang juga digunakan secara tukar-pakai dengan istilah “*citizenship education*”. Dimana menurut Mahoney yang dikutip oleh Soemantri (Budimansyah & Suryadi, 2008: 3) bahwa “*civics education* merupakan suatu proses pembelajaran semua mata pelajaran, kegiatan siswa, proses administrasi, dan pembinaan dalam upaya mengembangkan perilaku warganegara yang baik”.

Berkenaan dengan *Civics Education*, pendapat lain sebagaimana dikemukakan oleh Branson (1999: 4) yang mengemukakan bahwa “*Civics Education* dalam demokrasi adalah pendidikan untuk mengembangkan dan memperkuat dalam atau tentang pemerintah otonom (*Self Government*). Pemerintahan otonom demokratis berarti bahwa warganegara aktif terlibat dalam pemerintahannya sendiri”.

Di Indonesia sendiri pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran wajib yang harus dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan juga pendidikan tinggi. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, pada pasal 37. Dimana istilah dari pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia berubah-ubah hal ini berkaitan dengan pemerintah dan kebijakan politik dari pemerintah itu sendiri yang mengharuskannya berganti-ganti.

Menurut kurikulum 1994 (Budimansyah & Suryadi, 2008: 11) mengartikan pendidikan

kewarganegaraan sebagai: “.mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa indonesia, nilai luhur dan moral tersebut diharapkan dapat di wujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari siswa, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa”.

Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya bermuara untuk dapat menghasilkan luaran (*Output*) berupa peserta didik sebagai warganegara yang baik (*good citizenship*), yang meliputi pengetahuan akan hak dan kewajiban, serta baik secara karakter, etika, serta tanggung jawab dan demokratis.

Metode Penelitian

Untuk dapat menunjang penelitian yang akan dilaksanakan, lokasi penelitian yang tepat merupakan hal yang penting dalam mendapatkan data yang diharapkan. Oleh karena itu Penelitian ini dilakukan pada Sekolah Menengah Atas Taruna Bakti Bandung, yang berlokasi di Jl. L.L.RE.Marta Dinata No.52 Bandung 40115. Dengan melihat model persekolahan tersebut dengan menjadikan lembaga pendidikan pembauran terkemuka.

Dalam penentuan subjek penelitian. Peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Lincoln dan Guba (Sugiyono, 2012: 302) mengemukakan bahwa “*naturalistic sampling is, then, very different from conventional sampling. It is based on informational, not statistical, considerations. Its purpose is to maximize information, not to facilitate generalization*”. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif (naturalistik) sangat berbeda dengan penentuan sampel dalam penelitian konvensional (kuantitatif). Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan. Dalam penelitian ini, yang menjadi Subjek penelitian adalah : 1) Kepala sekolah, 2) Wakasek Bidang Kurikulum, 3) Guru mata pelajaran PKN SMA Taruna Bakti (1orang), 4) Siswa SMA taruna Bakti (4 siswa).

Teknik Pengumpulan Data

Observasi merupakan suatu cara pengamatan langsung realita sosial yang berlangsung di lapangan untuk dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai apa yang diteliti. Marshall (Sugiyono, 2012: 309) mengemukakan bahwa, “melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai observer nonpartisipan”.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.

Studi dokumentasi merupakan salah satu cara dengan pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti,

sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Guba dan Lincoln (Basrowi & Suwandi, 2011:159) mendefinisikan *dokumen* dan *record* adalah sebagai berikut: Record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting, dan dokumen ialah setiap bahan tertulis atau film, lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.

Teknik Analisis Data

Basrowi & Suwandi (2008: 209) mengemukakan bahwa “Reduksi Data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, mengabstraksikan dan pentransformasian data kasardari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian itu berlangsung”.

Menurut Basrowi & Suwandi (2008: 209) mengartikan “ Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan”. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagian. Dalam hal ini Miles dan Huberman (Sugiyono, 2012: 339) mengemukakan “*the most frequency form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan merupakan gambaran atau deskripsi suatu objek yang sebelumnya masih belum pasti sehingga menjadikan gambaran atau deskripsi objek tersebut jelas.

Pengujian Keabsahan Data

Sugiyono (2012: 265-374) Mengemukakan Sebagai pencarian keabsahan hasil penelitian dilapangan, peneliti menggunakan pengujian validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Sugiyono. Yakni uji *credibility* (validitas internal). *dependability*, dan *confirmability* (obyektivitas).

Pembahasan

Penerapan Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis multikultural di sekolah, merupakan tuntutan yang harus terus dikembangkan Sebagai penghargaan terhadap keberagaman dan menghargai berbagai keunikan yang ada. Hal ini berkaitan dengan fungsi sekolah yang memandang keberagaman siswa. Menurut KS yang menuturkan bahwa penerapan pembelajaran yang berbasis multikultur berjalan sejak awal berdirinya sekolah Yayasan Taruna Bakti atau yang disingkat YTB. Dimana muatan

tersebut menurutnya di integrasikan pada semua mata pelajaran, Seperti yang diketahui bahwa SMA Taruna Bakti mengusung sekolah pembauran terkemuka di Bandung dengan menjalankan visi misi yang tentu siswa sebagai input sekolah yang beragam dari berbagai latar belakang Agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha. Lebih lanjut KS menuturkan pula bahwa Sekolah telah menyediakan fasilitas yang dapat menunjang terjadinya pembelajaran yang berbasis multikultural tersebut. Sekolah dalam menerima siswa tidak memandang mereka berasal dari mana dan atau latar belakang kebudayaan mereka bagaimana, pihak sekolah akan dengan senang hati menerima siswa dari berbagai latar belakang, dalam hal ini melihat dari segi Suku, Agama, Ras, Budaya dan Adat Siswa. Seperti yang diungkapkan pula oleh KS bahwa dalam rapat pimpinan Yayasan Taruna Bakti “Sikap Adil” harus terus dikembangkan dan diberlakukan kepada seluruh siswa. Walaupun menurut beliau memang di sekolah Taruna Bakti belum secara jelas menggunakan istilah Pendidikan Multikultural, akan tetapi mengambil ide pembauran tersebut sudah menggambarkan identitas pembelajaran yang berbasis multikultural.

Proses pembelajaran yang mengandung muatan multikultural dan pendidikan yang adil juga diungkapkan oleh PKS bahwa dalam proses pembelajaran di Taruna Bakti, berlangsung dengan adil dan tidak adanya pembatasan pendidikan antara satu dengan yang lainnya. Strategi lain yang dilakukan menurut PKS yakni dengan cara memberikan fasilitas guru agama dari setiap masing-masing agama yang berada di sekolah Taruna Bakti, dengan mengalihkan siswa yang non muslim ke sebuah kelas yang lain. Sekolah tidak menampilkan bahwa muslim merupakan agama dominan dalam setiap kelas, oleh karena itu mereka memberikan pengajaran lain sesuai dengan agamanya masing-masing agar tidak terjadi rasa tidak adil pada diri siswa. Dari segi kurikulum juga PKS mengatakan bahwa dengan adanya pelajaran muatan lokal Bahasa Sunda, siswa diajak mengenal kebudayaan sunda yakni salah satunya memahami bahasa sunda.

Proses pengintegrasian pembelajaran multikultural juga menurut PKS dilaksanakan ketika hari-hari besar keagamaan seperti Sanlat, Hari Raya Kurban, dan Hari Besar Agama lainnya. Dan siswa seolah-olah berbaur dengan kegiatan, namun tetap menurut beliau di hari besar tersebut walaupun siswa lain ikut bercampur namun tidak mengganggu dari inti substansi agama masing-masing.

KS juga menuturkan bahwa semua orang dapat melihat juga dari segi bangunan yang tidak spesifik menyediakan sebuah bangunan masjid seperti kebanyakan sekolah lain, akan tetapi menyediakan tempat dan ruangan-ruangan untuk beribadah. Faktor pendukung lain yakni kegiatan ekstra kulikuler di Sekolah Taruna Bakti yang menunjang tidak adanya pembatasan atau ekstra kulikuler yang tertutup untuk siswa tertentu, akan tetapi ketika siswa itu mendaftar di ekstra kulikuler tersebut mereka akan menerimanya dan bebas tidak terpaut latar belakang.

Dengan begitu, para siswa yang memiliki keberagaman akan menjadikan kelasnya sebagai tempat pembelajaran untuk bagaimana menghargai dan menghormati keberadaan yang lain, dan sebagai peredam konflik yang bernuansakan kultural. Seperti yang diungkapkan oleh SW I bahwa dalam memulai pelajaran PKN mereka mendengarkan ibadah pagi berupa cerita motivasi yang kemudian dilanjutkan do'a, yang ditujukan kepada seluruh kelas dan diperdengarkan melalui pengeras suara. Doa pagi yang diperdengarkan tersebut untuk dapat menanamkan keadilan dan juga kebersamaan agar siswa terbiasa untuk mengaplikasikannya dimanapun.

Oleh karena itu, pembelajaran yang berbasis multikultural dirasa efektif untuk saling mengurangi prasangka buruk terhadap golongan yang lain. Hal ini sejalan dengan penuturan SW I bahwa Ketika pembelajaran PKN berlangsung suasana belajar yang nyaman tidak ada rasisme atau yang lainnya di kelas, pembelajaran berlangsung dirasa menyenangkan karena siswa dibiasakan untuk saling menghormati. Ketika pembelajaran di kelas mereka juga diberikan pemahaman untuk menghormati seperti yang diungkapkan oleh guru "saling menghormati", yakni guru memberikan pemahaman untuk memberikan hak yang sama dengan yang lainnya misalkan dalam persamaan hak untuk berbicara sehingga yang dirasakan suasana dalam kelas adalah demokratis.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah diuraikan nampak bahwa implementasi pendidikan multikultural dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas Taruna Bakti Bandung menekankan pada sikap toleransi, adil, dan sikap saling menghormati terhadap seluruh civitas akademika. Pendidikan multikultural tersebut sebagai muatan yang tidak tercantum dalam kurikulum SMA Taruna Bakti secara jelas, akan tetapi sebagai penunjang dalam mencapai tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Daftar Pustaka

Buku

- Basrowi& Suwandi.(2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Budimansyah, D. dan Suryadi, K. (2008). *PKN dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia
- L. Tiedt, P dan M. Tiedt, I. (1990). *Multicultural Teaching. United Stade: Allyn and Bacon A Division of simon & Schuster, Inc.*
- Mahfud, C. (2011). *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Naim, N. dan Sauqi, A. (2010). *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*.Jogjakarta: Ar-Ruzz Medi Group
- Sugiyono.(2012). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta
- Kusmarni, Y. (2008). *Pendidikan Multikultural Suatu Kajian Tentang Pendidikan Alternatif Di Indonesia Untuk Merekatkan Kembali Nilai-Nilai Persatuan, Kesatuan Dan Berbangsa Di Era Global*.

Jurnal dan Internet

- Imam (2012). *Menggagas Pendidikan Multikultural*. Tersedia: <http://sumsel.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=11413> [Jumat, 15 Maret 2013]
- Maulana.(2008). *Pendidikan Multikultur Dalam Tinjauan Pedagogik*. Tersedia: http://file.upi.edu/browse.php?dir=Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/196601131990012-YANI_KUSMARNI/ [Jumat, 15 Maret 2013].
- Tersedia:<http://maulanusantara.wordpress.com/2008/04/30/pendidikan-multikultural-dalam-tinjauan-pedagogik/> [Rabu 24 april 2013]